

DINAMIKA SISTEM KOTA-KOTA DAN PEMILIHAN ALTERNATIF PUSAT PERTUMBUHAN BARU DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

oleh

Bambang Sriyanto Eko Prakoso dan Luthfi Muta'ali

Staf Pengajar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah menganalisa dinamika dan variasi perkembangan sistem kota-kota dan karakter kekotaan, guna memilih atau menentukan alternatif pengembangan pusat-pusat baru di Propinsi DIY, sehingga pembangunan lebih merata. Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis dengan analisis data sekunder. Lingkup daerah penelitian meliputi seluruh desa di Propinsi DIY, sejumlah 438 desa yang tersebar di lima Kabupaten. Variabel yang digunakan meliputi variabel demografis untuk menganalisa sistem dan hirarki kota-kota dan variabel karakter kekotaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Index primacy, Analisis Faktor, Crosstab dan Korelasi, Pembuatan Tipologi Wilayah. Sedangkan analisis spasial atau pemetaan dengan program Arc View.

Hasil penelitian menunjukkan, dinamika sistem kota-kota di Propinsi DIY sepanjang tahun 1960-2002 memperlihatkan gejala primacy atau pemusatan perkembangan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya (pinggiran). Hal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan perkembangan wilayah dan beban kota semakin meningkat. Semakin tinggi peringkat wilayah, semakin dinamis perubahan yang terjadi, serta semakin tinggi karakter kekotaan yang dimilikinya. Fenomena pemusatan perkembangan yang terjadi di kota Yogyakarta dan sekitarnya merupakan bukti empiris pemusatan sistem perkotaan. Berdasarkan analisis yang komprehensif, ditetapkan kluster pusat pertumbuhan baru di lima Kabupaten Kota, yaitu Kluster Sentolo (Kabupaten Kulonprogo), Kluster Srandakan-Galur (Kabupaten Bantul), Kluster Playen-Patuk (Kabupaten Gunung Kidul), Kluster Tempel-Sleman (Kabupaten Sleman), dan Kluster Giwangan (Kota Yogyakarta).

Penelitian merekomendasikan redistribusi hasil-hasil pembangunan melalui pengembangan dan penguatan pusat pertumbuhan baru, pembentukan tata ruang perwilayahan dan sistem perkotaan yang fungsional. Pusat pertumbuhan baru harus 'mandiri' dan diintegrasikan dengan wilayah belakangnya (hinterland), sehingga tercipta keterkaitan fisik maupun ekonomi, khususnya dengan daerah perdesaan atau kawasan sentra produksi (agropolitan).

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Selama beberapa dekade kebijaksanaan pengembangan wilayah di Indonesia lebih bersifat *urban bias*, terutama dengan pengembangan industri di kota-kota besar, hal ini telah menyebabkan semakin meningkatnya kesenjangan laju pertumbuhan antara perkotaan dan perdesaan (Tjiptoherijanto, 1999; NUDS, 2000 dan Budhy, 2004). Pola keruangan (spasial) perkembangan penduduk perkotaan di Indonesia menunjukkan gejala yang menarik. Dengan menggunakan indek primasi¹ pada tahun 1990 menunjukkan angka 0,58, yang berarti hampir 60% jumlah penduduk perkotaan pada empat wilayah perkotaan terbesar di Indonesia (Firman, 1997), yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Bahkan pangsa penduduk perkotaan JABOTABEK terhadap nasional telah mencapai 23,6% pada tahun 1990 atau mendekati seperempat. Menguatnya gejala primasi ini memperlihatkan perbedaan wilayah kota dan desa semakin melebar, dan peran kota kecil-menengah semakin melemah karena terdominasi kota-kota besar (Soetomo, 2004).

Gejala menguatnya primasi dan peran kota besar juga dijumpai di Propinsi DIY. Kota Yogyakarta berkembang sangat cepat dan membesar hingga kedaerah pinggiran, sehingga membentuk pola padu yang sangat besar, sementara kota-kota lainnya seperti ibukota kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo serta Gunung Kidul relatif stagnan. Kelambatan perkembangan di wilayah-wilayah di luar kota Yogyakarta bukan disebabkan oleh rendahnya potensi wilayah dan sistem aksesibilitas dalam memacu perkembangan wilayah, namun lebih diakibatkan terlalu besarnya dominasi kota Yogyakarta dalam mengambil sebagian besar peran fungsi DIY. Sebaliknya, kota Yogyakarta kurang dapat memainkan fungsinya sebagai pusat pertumbuhan yang mampu memberikan *trickle down effect* bagi perkembangan daerah belakangnya.

Sebagai konsekuensi logis dari sifat tersebut di atas adalah semakin unggul (primatnya) kota-kota besar dan menguasai daerah belakangnya (Friedmann, 1976). Masalah serius lainnya yang juga muncul adalah meningkatnya kemiskinan, baik diperdesaan maupun perkotaan sebagai akibat tidak mampunya kota didalam menampung luapan arus tenaga kerja, sehingga menjadi pengangguran (Kusbiantoro, 2004). Oleh karena itu strategi pengembangan wilayah lebih difokuskan pada strategi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah yang sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan wilayah (Glasson, 1977, Firman, 1997).

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pembentukan sistem tata ruang ke dalam tingkatan hirarki pusat-pusat permukiman dan sistem kota-kota, merupakan keharusan agar wilayah bersangkutan dapat berkembang dengan cepat, merata dan terpadu. Ketidakjelasan sistem ruang, terutama di wilayah yang terbelakang merupakan sebab munculnya ketimpangan antar wilayah, bahkan secara tegas Rondinelli (1985) mengatakan bahwa kesenjangan antar wilayah disebabkan adanya sistem spasial yang tidak terintegrasi secara baik.

Dengan pendekatan yang terpadu melalui keterkaitan dan perkembangan sistem kota-kota, diharapkan issue-issue mengenai ketimpangan wilayah akan dapat teratasi sekaligus dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang lebih maju (Haeruman, 2004). Oleh karena itu dirasa perlu adanya suatu penelitian mengenai studi dinamika (perkembangan) sistem kota-kota dan pemilihan alternatif pusat-pusat pengembangan baru hingga dapat membentuk suatu sistem perwilayahan yang akan menunjang program pemerataan dan pertumbuhan wilayah (Talkutputra, 2004).

Dari permasalahan tersebut di atas maka dapat disusun pertanyaan penelitian yang dapat dijadikan fokus dan pengarah penelitian, yaitu : bagaimanakah dinamika sistem kota-kota dan karakter kekotaanya di Propinsi DIY, apakah ada kaitan atau hubungan antara hirarki sistem kota-kota dengan tingkat kekotaan, serta dimanakah letak kota-kota alternatif pusat pertumbuhan baru² yang dapat mendorong perkembangan wilayah yang lebih merata.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji dinamika sistem kota-kota dan dominasi perkotaan di Propinsi DIY selama rentang waktu 1960-2002.
2. Menganalisis hirarki atau peringkat wilayah dan karakter kekotaan beserta dinamika perubahannya sebagai dasar penentuan pusat pertumbuhan baru.
3. Menganalisis hubungan antara hirarki atau peringkat wilayah dan karakter kekotaan beserta dinamika perubahannya
4. Menentukan wilayah potensial sebagai pusat pertumbuhan baru dan menetapkan kluster pusat pertumbuhan baru terpilih.

Tinjauan Pustaka

Sistem kota-kota biasanya berada dalam struktur tata ruang kota wilayah yang meliputi kota besar (*metropolitan*), kota menengah (*secondary city*) dan kota kecil (*small city*) (World Bank, 1994). Hubungan keterkaitan antar kota sebagai sebuah sistem memerlukan prasyarat adanya wahana yang menghubungkannya secara fisik berupa jalur-jalur transportasi, yang menjadi titik tolak terciptanya keterkaitan yang lebih fungsional (Haeruman, 2004).

² Pusat pertumbuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekumpulan (kluster) desa yang memiliki sifat-sifat kekotaan yang tinggi dan dinamis, letak yang strategis, kekuatan sumberdaya lokal, serta didukung oleh kebijakan pemerintah, khususnya fungsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selama ini Propinsi DIY menggunakan unit Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan, karena tidak semua desa dalam sebuah kecamatan mampu

Sistem kota sebagai representasi struktur tata ruang wilayah pada dasarnya menjadi sebuah wahana difusi kegiatan dan hasil pembangunan salah satunya melalui penyebaran investasi (Moelyarto, 1995). Ketiadaan keterikatan antara kota-kota sebagai pusat pertumbuhan akan menghambat proses penyebaran kemajuan ke wilayah lain yang berakibat intensitas dan konsentrasi kegiatan dan hasil-hasil pembangunan hanya terjadi dikota-kota pusat pertumbuhan saja (Misra, 1975 dan Rondinelli, 1978). Kunci bagi pertumbuhan sekaligus pemerataan disuatu wilayah adalah melalui penciptaan hubungan (keterkaitan) yang saling menguntungkan antar pusat-pusat pertumbuhan juga dengan wilayah pengaruhnya (sistem kota-kota).

Implikasi dari terjadinya intensitas dan konsentrasi kegiatan dikota-kota pusat pertumbuhan akan melahirkan apa yang dikenal sebagai kota primate yang tumbuh pesat diikuti kompleksitas permasalahan didalamnya. Kota-kota primate (*primate city*) berkecenderungan berukuran sangat besar dan mendominasi perkembangan kota-kota lain yang lebih kecil dalam suatu wilayah (Anonim, 1983, ESCAP, 1993). Dominasi kota-kota primate terutama pada dimensi penduduk, kegiatan komersial, output industri dan pengaruh politik (Rondinelli, 1983). Fenomena tersebut menyebabkan kota-kota primate memikul beban berat kegiatan pembangunan, yang berimplikasi pada terjadinya disparitas regional yang tidak menguntungkan bagi pembangunan secara keseluruhan. Pada konteks inilah strategi sistem kota dalam pembangunan wilayah menjadi penting (Taylor, 1981).

Sistem kota merupakan sekumpulan kota-kota yang saling tergantung satu sama lain secara fungsional dalam suatu wilayah (Fisher, 1983). Pada perspektif organisasi dan struktur keruangan hubungan-hubungan ini terjadi antara kota-kota yang berbeda tingkat pertumbuhannya pada dimensi kependudukan maupun sosial-ekonomi. Dalam konteks pengembangan wilayah, sistem kota dipandang terutama pada dimensi ukuran kependudukan dan peran sosial-ekonomi dengan fokus pertumbuhan dan perubahan struktur wilayah dari masing-masing kota.

Perkembangan sistem kota sangat terkait dengan tahapan pembangunan disuatu wilayah atau negara. Dalam pengkajiannya terhadap sistem kota terutama dinegara barat, Thomas dan Herbert, 1982 (dalam Friedman, 1976) berkesimpulan ada 3 tahap perkembangan sistem kota yang merupakan suatu alur perkembangan, yaitu :

1. sistem kota pada tahap pra-industrialisasi, yang terdiri hanya satu kota individual (*urban nucleus*).
2. sistem kota pada tahap industrialisasi, yang ditandai oleh terjadinya proses perkembangan pesat kota tunggal secara fisik sebagai akibat urbanisasi.
3. sistem kota pada tahap post-industrialisasi, ditandai oleh terbentuknya kota regional.

Pada tahap ketiga (post-industrialiasi), sistem kota memiliki karakteristik berupa

ungan-hubungan fungsional didalam wilayah konurbasi memiliki kondisi yang khas apa menurunnya dominasi fungsi kota utama dan mulai menyebarnya fungsi-fungsi g ada dikota utama secara relatif ke kota-kota yang lebih kecil diwilayah pengaruhnya. am hal ini perhatian tidak lagi terfokus pada kota utama namun lebih dalam konteks sm kota ditandai oleh mulai intensifnya hubungan fungsional antar kota utama dengan 1-kota disekitarnya.

Pada tahap akhir perkembangan sistem kota sebagaimana diuraikan di atas, beberapa a kecil mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan dan berkecenderungan jjadi kota menengah (*secondary city*). Kota-kota menengah ini biasanya memiliki ungan keterkaitan fungsional yang erat dengan kota utama.

Rondinelli (1983) mengemukakan bahwa banyak wilayah di Negara Sedang kembang tidak memiliki sistem spasial yang terintegrasi sehingga kota-kota utama atau erapa pusat Metropolitan yang tersebar tidak mempunyai hubungan produksi dengan a-desa atau permukiman-permukiman yang tersebar di perdesaan. Dalam kasus onesia tesis ini muncul dengan semakin membesarnya fenomena mega urban, yang munculkan kekuatan JABOTABEK, GERBANGKERTASUSILA, JOGLOSEMAR, IDAN, dan BANDUNG dalam struktur perkembangan spasial kota-kota di Indonesia rmapatti, 1993, United Nation, 1994 dan 1995).

Johnson (Firman, 1997) mengemukakan bahwa kekurangan sistem spasial di Negara lang Berkembang bukanlah pada tidak adanya pusat-pusat perkembangan, tetapi yang adi adalah lemahnya sistem spasial. Akibatnya tidak ada hirarki fungsional dari sistem a-kota sehingga tidak terbentuk sistem pertukaran (*exchange*) yang mantap.

Pembentukan suatu integrasi spasial di suatu wilayah dapat dilakukan dengan ngembangkan permukiman atau sistem kota-kota yang memiliki hirarki dan menciptakan itu keterkaitan antar kota atau dengan kata lain mengintegrasikan pembangunan kotaan dan perdesaan. Hal ini dilakukan dengan membentuk jaringan produksi, distribusi 1 pertukaran yang mantap mulai dari desa – kota kecil – kota menengah – kota besar urzaman, 2000). Pendekatan ini didasarkan oleh pemikiran bahwa dengan adanya integrasi 1 artikulasi sistem pusat-pusat pertumbuhan yang berjenjang dan berbeda karakteristik igsionalnya, maka pusat-pusat tersebut akan memacu penyebaran perkembangan layah. Dengan demikian peran sistem kota-kota sangat besar dalam memacu kembangan wilayah (Rondinelli, 1983).

Penataan sistem kota-kota yang memiliki hirarki dan keterkaitan merupakan elemen uma menciptakan sistem tata ruang yang integratif, seperti yang telah dilakukan oleh I/CAP (1993) dan Dusseldorp (1981), yang membuat jenjang kota-kota yang meliputi sat regional, pusat distrik, pusat sub distrik, dan pusat lokal.

Pembentukan suatu integrasi spasial di suatu wilayah dapat dilakukan dengan ngembangkan permukiman atau sistem kota-kota yang memiliki hirarki dan menciptakan

perkotaan dan perdesaan (Rondinelli, 1985), dengan cara membentuk jaringan produksi, distribusi dan pertukaran yang mantap mulai dari desa – kota kecil – kota menengah – kota besar. Pendekatan ini didasarkan oleh pemikiran bahwa dengan adanya integrasi dan artikulasi sistem pusat-pusat pertumbuhan yang berjenjang dan berbeda karakteristik fungsionalnya, maka pusat-pusat tersebut akan memacu penyebaran perkembangan wilayah. Dengan demikian peran sistem kota-kota sangat besar dalam memacu perkembangan wilayah. Dengan adanya hirarki dan spesialisasi fungsi kota-kota diharapkan terjadi keterkaitan (keterkaitan fisik, ekonomi, mobilitas penduduk, teknologi, sosial, pelayanan jasa, interaksi sosial, dan administrasi politik) yang dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang dapat memacu perkembangan wilayah.

CARA PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup wilayah penelitian adalah di seluruh desa Kabupaten dan Kota di Propinsi DIY, yaitu sejumlah 439 desa. Unit analisis yang digunakan adalah desa dengan basis analisis data sekunder. Secara umum, penelitian ini lebih bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kuantitatif.

Metode Penelitian

1. Data dan Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari tiga aspek yaitu : aspek demografis, komponen perkotaan, dan kebijakan pembangunan, khususnya sistem kota-kota. Data diperoleh dari berbagai macam sumber data sekunder dan publikasi relevan, dengan rentang waktu 1960-2003. Selain data sekunder, ditambah hasil wawancara terhadap pengambil kebijakan (*policy makers*), dari Bappeda propinsi dan kabupaten. Beberapa indikator dan variabel penelitian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Data dan Variabel Penelitian

INDIKATOR	Variabel	Kegunaan
Geografi	Lokasi (letak), Batas, luas, status Wilayah geomorfologi, fisiografi, jarak terhadap pusat pertumbuhan (Kota Kabupaten)	Deskripsi umum dan analisis variasi keruangan, serta aksesibilitas
Hirarki Wilayah		
Demografis	Jumlah penduduk, Tahun 1960, 1971, 1980, 1990, 2000, 2002	Analisis <i>city size distribution</i> , tingkat keutamaan sistem kota (<i>primacy</i>)
Karakter/Unsur Kekotaan		
1. Kepadatan penduduk	1. Jumlah penduduk 2. Luas Wilayah	Analisis kekuatan karakteristik kota
2. Pertumbuhan penduduk	Jumlah penduduk tahun 1990, 2002	
3. Lahan Terbangun	1. Luas Lahan Terbangun (Permukiman dan lain-lain) 2. Luas Wilayah	
4. Penduduk Non pertanian	1. Penduduk bermata pencaharian 2. bukan pertanian 3. Jumlah Penduduk	
5. Fasilitas Sosial Ekonomi	Fasilitas Sosial (TK, SD, SLTP, SLTA, PT, Kursus, Rumah sakit, Poliklinik/RSB, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Praktek Dokter, Paramedis, Apotik, Toko Obat) Fasilitas Ekonomi (Toko, Pasar Permanen, Pasar Hewan, Toko Elektronik, SPBU, Restoran, Penyewaan Alat pesta, Bengkel, Reparasi, Hotel, tempat rekreasi, Bank, BPR, Pegadaian, KUD, Keuangan, Telpon umum, Kantor Pos, Terminal, wartel.	
D. Kebijakan Pembangunan		
	Sistem perkotaan Pusat-pusat pertumbuhan Satuan Wilayah Pembangunan Tata ruang wilayah	Kesesuaian antara hasil kajian dan kebijakan pembangunan (analisis kebijakan)

2. *Prosedur Pelaksanaan dan Analisis Data*

a. *Identifikasi dinamika sistem kota-kota*

Meliputi perubahan peringkat hirarki wilayah dari tahun 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 dan tahun 2002. Selanjutnya dilakukan analisis *city size distribution* dan indeks *primacy* dengan menggunakan Zipf's, sehingga dapat ditentukan sistem kota dan tingkat primasinya (dominasi peran kota utama), yaitu :

$$P_r = k/r^q$$

Keterangan :

P_r = jumlah penduduk kota pada jenjang ke-r,

r = jenjang kota,

k = bilangan konstanta,

q = merupakan derajat kemiringan dari garis regresi

$$\log P_r = k - q \cdot \log r$$

Jika $q > 1$, menunjukkan dominasi kota besar (*primate domination*)

Jika $q < 1$, menunjukkan adanya peranan yang besar dari kota-kota di bawah jenjang kota terbesar.

b. *Analisis kekuatan karakter kekotaan*

Dengan menggunakan Analisis Faktor untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik utama atau variabel kekotaan. Penelitian ini membuat rating dari wilayah yang memiliki nilai tertinggi sampai terendah. Selain itu analisis ini juga menghasilkan variabel-variabel yang dominan dalam menentukan tingkat kekotaan.

c. *Analisis Korelasi*

Antara hirarki kota dengan karakteristik kekotaan dengan menggunakan teknik statistik korelasi Rank Spearman.

d. *Penentuan Wilayah Potensial sebagai pusat pertumbuhan baru*

Yaitu wilayah yang memiliki hirarki tinggi dan mengalami kenaikan peringkat dan memiliki karakter kekotaan yang kuat dan dinamis (skor naik) (Tabel 2).

e. *Penentuan atau penetapan Kluster Pusat Pertumbuhan Baru terpilih*

Dilakukan Analisis deskriptif, dengan memperhatikan kebijakan tata ruang wilayah dan rencana para pengambil keputusan (*policy maker*). Oleh karena itu juga dilakukan wawancara dengan pengambil kebijakan untuk memperoleh gambaran tentang pusat pertumbuhan dan kebijakan di daerah masing-masing.

Tabel 2. Potensi Wilayah Sebagai Pusat Pertumbuhan

Tingkat atau Peringkat Wilayah	Karakter Kekotaan	
	Tipe I (skor kekotaan tinggi dan naik)	Tipe II (skor kekotaan rendah dan naik)
Tipe I (Tingkat tinggi dan peringkat naik)	Pusat Pertumbuhan Utama	Pusat Pertumbuhan Kedua
Tipe II (Tingkat rendah dan peringkat naik)	Pusat Pertumbuhan Kedua	Pusat pertumbuhan Ketiga (Cadangan)

eterangan : Naik turunnya peringkat hirarki wilayah dan skor kekotaan adalah dalam rentang waktu pengamatan 1960-2002

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Sistem Kota-Kota Di Propinsi DIY

Sistem kota-kota menunjukkan sebaran kota-kota yang disusun menurut urutan jumlah penduduk terbesar hingga terkecil, sehingga dapat memperlihatkan suatu peringkat atau hirarki kota-kota. Menurut Geogre K Zipf (dalam Morrill, 1974), semakin besar indeks utama (*index of primacy*), semakin kuat peranan (dominasi) dan tingkat keutamaan suatu kota (wilayah) terhadap kota atau wilayah pada jenjang (peringkat) di bawahnya.

Selama rentang waktu 1960-2002, nilai *index of primacy* di Propinsi DIY semakin meningkat, yaitu dari 0,356 tahun 1960 menjadi 0,382 di tahun 2002 (Tabel 3). Meskipun naiknya tidak besar, gejala ini memperlihatkan semakin meningkatnya peran kota (besar) terhadap kota-kota di bawahnya. Kecenderungan menguatnya peran kota utama terutama terjadi di Kota Yogyakarta dan sekitarnya atau sering disebut *Yogyakarta Urban development Program* (YUDP). Dengan kata lain, perkembangan wilayah-wilayah lain luar YUDP berjalan lambat dan pembangunan masih terkonsentrasi di daerah-daerah UDP. Dari segi pemerataan pembangunan dan manajemen perkotaan, hal ini tidak menguntungkan, karena beban kota Yogyakarta semakin besar bahkan dapat melampaui daya dukung yang dimilikinya. Selain itu hal ini juga mengakibatkan tidak berfungsinya kota kecil dan menengah.

Tabel 3. Dinamika Indeks keutamaan Kota di Propinsi DIY (dengan unit Desa) tahun 1960, 1970, 1980, 1990, 2002

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta	DIY
1960	0.389	0.336	0.269	0.280	0.378	0.356
1970	0.383	0.343	0.273	0.289	0.333	0.359
1980	0.380	0.348	0.280	0.298	0.307	0.364
1990	0.394	0.357	0.299	0.317	0.249	0.367
2002	0.361	0.352	0.292	0.313	0.253	0.382

Analisis perbandingan tiap Kabupaten dan kota memperlihatkan bahwa Kabupaten Kulonprogo dan Bantul memiliki indek yang besar dibanding wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di dua Kabupaten tersebut pola pembangunan dan penduduk lebih mengkonsentrasi di pusat ibu kota Kabupaten dan pusat Kecamatan. Meskipun demikian di kabupaten Kulonprogo menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun atau mulai tumbuhnya daerah-daerah lain di luar wilayah utama. Sebaliknya di Kabupaten Bantul indek semakin meningkat. Berdasarkan uraian di atas, meskipun gejala *primacy* atau pemusatan penduduk dan perkembangan wilayah semakin meningkat, namun sejak tahun 1990-2002 telah mulai terjadi proses perkembangan wilayah yang lebih merata, terutama pada daerah-daerah diluar kawasan YUDP.

Hirarki Kota-Kota Di Propinsi DIY

Hirarki sistem kota-kota dapat digunakan untuk memilih atau menentukan pusat pertumbuhan baru. Asumsi dasar adalah bahwa wilayah yang memiliki urutan ranking kota tinggi (jumlah penduduk) dan mengalami perubahan (kenaikan) peringkat, maka semakin besar potensinya untuk dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan (lihat tabel 2). Diantara empat tipe tersebut, dua tipe, yaitu tipe 1 (hirarki tinggi dan peringkatnya naik) dan tipe 2 (hirarki rendah, namun mengalami kenaikan peringkat) akan dianalisis lebih lanjut, karena memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan baru. Dari 438 desa yang dianalisis, terdapat 120 (27,4%) desa tipe 1 dan 84 desa tipe 2 (19,4%). Persebaran tipe wilayah di masing-masing Kabupaten Kota memperlihatkan jumlah terbanyak untuk tipe 1 adalah kabupaten Sleman, sebanyak 41 desa, disusul kabupaten Bantul dan kota Yogyakarta. Sedangkan tipe 2 lebih banyak disumbang dari kabupaten Kulonprogo dan Gunung Kidul, sebanyak 28 dan 32 desa (Tabel 4 dan Lampiran Gambar 1).

Tabel 4. Tipologi wilayah mendasarkan peringkat dan Perubahan Hirarki Kota-kota di Kabupaten-kabupaten dan Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tipologi	Kulon Progo		Bantul		Gunung Kidul		Sleman		Yogyakarta		DIY	
	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
Tipe1 (Tinggi, Naik)	9	10.2	30	40	14	9.7	41	47.7	26	57.8	120	27.4
Tipe2 (Rendah, Naik)	28	31.8	13	17.3	32	22.2	9	10.5	3	6.7	85	19.4
Tipe3 (Tinggi, Turun)	14	15.9	26	34.7	17	11.8	26	30.2	15	33.3	98	22.4
Tipe4 (Rendah, Turun)	37	42	6	8	81	56.3	10	11.6	1	2.2	135	30.8
Jumlah	88	20.1	75	17.1	144	32.9	86	19.6	45	10.3	438	100

Keterangan : Penentuan tinggi rendah dilakukan dengan pengelompokan (klustering), sedangkan penentuan naik dan turunnya peringkat dilakukan dalam rentang waktu pengamatan 1960-2002

Selain tipe 1 dan 2, tipe wilayah yang perlu mendapatkan perhatian pembangunan ialah tipe 3 dan 4. Tipe 3 adalah wilayah yang mengalami kejenuhan dan degradasi dan tipe 4 yang tidak mengalami perkembangan, yang sebagian besar berada di kabupatenulonprogo dan Gunung Kidul. Analisis ChiSquare terhadap tipe di atas, dengan berbagai macam uji, menunjukkan adanya hubungan antara hirarki (peringkat) wilayah dengan dinamika wilayah pada tingkat signifikansi 0.001 (Tabel 5).

Tabel 5. Hasil Analisis Chi-Square test antara Hirarki (peringkat) wilayah dengan perubahannya di Propinsi DIY

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11.891 ^b	1	.001		
Continuity Correction ^a	11.240	1	.001		
Likelihood Ratio	11.947	1	.001		
Fisher's Exact Test				.001	.000
Linear-by-Linear Association	11.864	1	.001		
N of Valid Cases	438				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 102.00.

Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara peringkat dan perubahannya, yaitu semakin tinggi peringkatnya kecenderungan perubahan kenaikan peringkat juga semakin besar. Hal ini berimplikasi bahwa masih terdapatnya konsentrasi perkembangan wilayah pada wilayah-wilayah ber-peringkat tinggi, sebaliknya wilayah lain relatif stagnan, bahkan mengalami penurunan.

Tingkat Kekotaan Di Propinsi DIY

Daerah yang menjadi pusat perkembangan selalu memiliki ciri-ciri perkotaan. Penelitian ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi karakter kekotaan suatu wilayah, maka semakin berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan baru. Berdasarkan analisis tingkat kekotaan dan perubahannya, dihasilkan dua tipe, yaitu tipe 1, yang memiliki skor dan perubahan skor perkotaan tinggi dan tipe 2, yaitu daerah yang meskipun memiliki skor kekotaan rendah tetapi memiliki kecenderungan yang naik (Tabel 6 dan Lampiran Gambar 2).

Tabel 6 . Tipologi wilayah berdasarkan skor kekotaan dan Perubahan skor perkotaan di Kabupaten dan Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tipe Kekotaan	Kulon Progo		Bantul		Gunung Kidul		Sleman		Yogyakarta		DIY	
	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
Tipe1 (Tinggi, Naik)	9	10.2	13	17.3	13	9.0	11	12.8	25	55.6	71	16.2
Tipe2 (Rendah, Naik)	43	48.9	14	18.7	74	51.4	26	30.2	2	4.4	159	36.3
Tipe3 (Tinggi, Turun)	2	2.3	21	28.0	6	4.2	26	30.2	18	40.0	73	16.7
Tipe4 (Rendah, Turun)	34	38.6	27	36	51	35.4	23	26.7	0	0	135	30.8
Jumlah	88	20.1	75	17.1	144	32.9	86	19.6	45	10.3	438	100

Keterangan : Penentuan tinggi rendah dilakukan dengan pengelompokan (klustering), sedangkan penentuan naik dan turunnya skor perkotaan dilakukan dalam rentang waktu pengamatan 1960-2002

Terdapat 71 wilayah desa yang sangat potensial berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru dan 159 sebagai daerah tipe 2. Persebaran tipe wilayah di masing-masing Kabupaten Kota memperlihatkan jumlah terbanyak untuk tipe 1 adalah Kota Yogyakarta, sebanyak 25 desa, disusul kabupaten Gunung Kidul, Bantul dan Sleman. Sedangkan tipe 2 lebih banyak disumbang dari kabupaten Gunung Kidul dan Kulonprogo, sebanyak 74 dan 43 desa. Hal ini menunjukkan, pada dasarnya dua wilayah tersebut juga mulai memiliki ciri-ciri wilayah perkotaan yang semakin berkembang dan berpotensi (Tabel 6). Meskipun demikian kedua Kabupaten tersebut juga merupakan daerah tempat berkumpulnya wilayah tipe 4, yaitu daerah stagnan dan tidak mengalami perkembangan.

Analisis ChiSquare terhadap tipe di atas, dengan berbagai macam uji, menunjukkan adanya tidak ada hubungan antara skor perkotaan dan perubahan tingkat kekotaan pada tingkat signifikansi 0.001. Hal ini dikarenakan pada uji signifikansi tersebut, hasil signifikasinya lebih besar dari 0.005 (Tabel 7).

Tabel 7. Hasil Analisis Chi-Square test antara Hirarki (peringkat) wilayah dengan perubahannya di Propinsi DIY

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.884 ^a	1	.347		
Continuity Correction	.703	1	.402		
Likelihood Ratio	.884	1	.347		
Fisher's Exact Test				.361	.201
Linear-by-Linear Association	.882	1	.348		
N of Valid Cases	438				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

Hal ini berimplikasi pada banyaknya muncul wilayah-wilayah baru, yang meskipun memiliki skor rendah atau tinggi tetapi mengalami perubahan yang cukup tinggi. Akibatnya wilayah tipe dua dan tiga cukup mendominasi, hal ini pertanda baik bagi munculnya daerah daerah baru yang memiliki karakter perkotaan, dengan kata lain mulai terdapat persebaran daerah-daerah yang memiliki karakter perkotaan keluar wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya, khususnya ke kabupaten Gunung Kidul dan Kulon progo.

Analisis Hubungan Hirarki Sistem Kota-kota Dengan Tingkat Kekotaan

Diantara empat komponen penilai dasar pusat pengembangan, pada tingkat signifikansi .001, hirarki wilayah memiliki hubungan positif yang sangat erat dengan perubahan peringkat hirarki dan skor perkotaan, namun berhubungan negatif dengan perubahan skor perkotaan. Perubahan peringkat wilayah berhubungan positif dengan hirarki dan skor perkotaan, namun tidak berhubungan dengan perubahan skor perkotaan (Tabel 8)

Tabel 8. Analisis Korelasi Spearman antara Hirarki wilayah, perubahan hirarki, skor perkotaan dan perubahan skor perkotaan

Correlations

			Hirarki	Perubahan Peringkat	Skor Kekotaan	Perubahan Skor Kekotaan
Spearman's rho	Hirarki	Correlation Coefficient	1.000	.213**	.538**	-.222**
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000
		N	438	438	438	438
	Perubahan Peringkat	Correlation Coefficient	.213**	1.000	.288**	-.012
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.808
		N	438	438	438	438
	Skor Kekotaan	Correlation Coefficient	.538**	.288**	1.000	.120*
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.012
		N	438	438	438	438
	Perubahan Skor Kekotaan	Correlation Coefficient	-.222**	-.012	.120*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.808	.012	.
		N	438	438	438	438

** . Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

Dua indikator perkotaan, yaitu skor kekotaan menunjukkan hubungan positif yang erat dengan hirarki dan perubahan peringkat serta berhubungan lemah dengan perubahan skor perkotaan. Sebaliknya perubahan skor kekotaan umumnya memiliki hubungan negatif dengan komponen lainnya. Berdasarkan analisis dan tabel di atas, dapat disimpulkan beberapa hal yang terkait dengan penelitian, yaitu :

- wilayah berperingkat tinggi umumnya juga berciri kekotaan yang tinggi, ditunjukkan

- menunjukkan terjadinya perkembangan lambat (stagnan) pada daerah-daerah yang memiliki peringkat tinggi. Fenomena kejenuhan perkembangan wilayah di dalam kota Yogyakarta merupakan bukti empiris dari hasil analisis tersebut.
- perubahan peringkat hanya terjadi pada wilayah-wilayah yang memiliki karakter kekotaan yang kuat dan hirarki tinggi. Sebagai contohnya adalah fenomena wilayah pinggiran kota Yogyakarta (kecamatan Depok, Mlati, Gamping, Sewon, Kasihan, Banguntapan) yang mengalami perubahan peringkat paling cepat sekaligus memiliki ciri-ciri kekotaan yang cukup kuat.
- perubahan skor kekotaan yang dinamis, terjadi pada wilayah yang berperingkat rendah, yang ditunjukkan oleh munculnya beberapa daerah-daerah di perdesaan yang mengalami pengkotaan atau seringkali disebut urbanisasi perdesaan, terutama di daerah selatan kabupaten Bantul (Srandakan-Brosot).

Potensi Pusat Pertumbuhan Baru Propinsi DIY

Berdasarkan penyusunan tipologi pada tabel 1 tentang daerah yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan baru, dilakukan analisis internal dimasing-masing Kabupaten dan Kota, sehingga dihasilkan tabel berikut (Tabel 9 dan Lampiran Gambar 3).

Tabel 9. Sebaran Wilayah Potensial sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten dan Kota, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tipe Wilayah Pusat Pertumbuhan	Kulon Progo		Bantul		Gunung Kidul		Sleman		Yogyakarta	
	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
Pusat Pertumbuhan Utama	8	9.0	5	6.7	10	6.9	8	9.3	4	8.9
Pusat Pertumbuhan ke2	11	12.5	7	9.3	25	17.4	7	8.1	4	8.9
Pusat Pertumbuhan ke3	18	20.5	22	29.3	35	24.3	21	24.4	12	26.7
Bukan Pusat Pertumbuhan	43	49.0	36	48.0	61	42.4	42	48.8	19	42.2
Wilayah Terbelakang	8	9.0	5	6.7	13	9.0	8	9.3	6	13.3
Jumlah	88	100	75	100	144	100	86	100	45	100

Sumber : hasil analisis

Berdasarkan Tabel 9, desa-desa yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan adalah yang masuk dalam tipe Pusat Pertumbuhan Utama dan Pusat Pertumbuhan Kedua, di sajikan dalam tabel berikut (Tabel 10).

Tabel 10. Nama Desa / Kelurahan yang Berpotensi menjadi Pusat Pengembangan Baru di Propinsi DIY

NO	KABUPATEN	PUSAT PERTUMBUHAN UTAMA	PUSAT PERKEMBANGAN KEDUA
1	Kulonprogo	Giripeni, Wates, Brosot, Tirtarahayu, Sentolo, Hargotirto, Banyuroto, Wijimulyo, Sidoharjo	Palihan, Glagah, Demen, Kaligintung, Karangwuluh, Karangwuni, Kaliagung, Kedungsari, Kebinharjo, Banjarsari, Purwoharjo
	Bantul	Trimurti, Bantul, Bangunjiwo, Tirtonirmolo	Ringinharjo, Sabdodadi, Terong, Bawuran, Singosaren, Baturetno, Pendowoharjo, Sendangsari
3	Gunungkidul	Karangduwet, Sidorejo, Gedangrejo, Dagri, Bleberan, Logandeng, Hargomulyo, Tegalrejo, Kampung, Sambirejo	Jetis, Banjarjo, Ngestirejo, Purwodadi, Tileng, Ngeposari, Ponjong, Sawahan, Bendungan, Kelor, Siraman, Selang, Ngunut, Playen, Bandung, Gading, Ngleri, Pengkok, Bunder, Patuk, Ngoro-oro, Kedungkeris, Nglipar, Kemijing, Bulurejo, Candirejo
4	Sleman	Margomulyo, Sidokarto, Balecatur, Trihanggo, Condongcatur, Caturharjo, Triharjo, Tridadi, Margorejo	Margoluwih, Sidomulyo, Tlogodadi, Jogotirto, Kalitirto, Bangunkerto
5	Yogyakarta	Gedongkiwo, Wirogunan, Baciro, Demangan	Giwangan, Sorosutan, Rejowinangun, Kricak

Sumber : Hasil analisis

Secara fungsional, karakteristik umum desa atau kluster desa yang terpilih sebagai alternatif Pusat pertumbuhan, baik pusat pertumbuhan utama maupun kedua adalah merupakan ibukota kecamatan, yang memiliki jarak relatif dekat serta aksesibilitas yang baik dengan aglomerasi kota Yogyakarta. Desa yang relatif jauh dengan kota Yogyakarta umumnya adalah merupakan daerah pedesaan.

Tahap selanjutnya, desa atau kluster desa yang terpilih menjadi pusat pertumbuhan potensial tersebut akan dianalisis kesesuaiannya dengan Kebijakan Pemerintah, khususnya Tata Ruang Wilayah dengan metode deskriptif. Selain itu juga dilakukan *cross-check* dan wawancara dengan pengambil kebijakan (Bappeda di masing-masing Kabupaten), untuk meminta pendapatnya terhadap pilihan-pilihan pusat pertumbuhan tersebut.

Pusat Pertumbuhan Baru Terpilih

Wilayah-wilayah desa yang tersebut pada tabel 10 selanjutnya dianalisis kesesuaiannya dengan kebijakan tata ruang wilayah dengan melakukan wawancara *key person*, yaitu pengambil kebijakan khususnya dari BAPEDA Propinsi DIY dan BAPEDA di masing-masing Kabupaten. Berdasarkan hasil kajian literatur, hasil analisis data dan wawancara dengan *policy maker* dihasilkan sejumlah kriteria komprehensif bagi terpilihnya pusat pertumbuhan baru, yaitu:

1. Memiliki nilai hirarki sistem kota-kota yang tinggi dan bukan pusat yang ada (pusat ibukota kabupaten). Selain itu juga mengalami proses perubahan nilai hirarki sistem kota-kota yang cepat.
2. Memiliki karakter kekotaan yang potensial dan berubah cepat
3. Tidak termasuk Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (Kota Yogyakarta dan wilayah pinggirannya)
4. Memiliki jarak yang cukup jauh dengan pusat kota (Yogyakarta) atau terdapat *space green area*, untuk menmgindari proses penyatuan dengan Kota Utama
5. Memiliki aksesibilitas atau daya jangkau yang relatif baik terhadap pusat kota (Yogyakarta), baik dari aspek sarana transportasi maupun prasarananya.
6. Memiliki kesesuaian dengan kebijakan politik (tata ruang wilayah), khususnya kebijakan hirarki permukiman atau sistem kota-kota.
7. Memiliki suatu kegiatan dan fungsi wilayah yang menonjol, baik yang bersifat produksi (basis ekonomi) maupun fungsi wilayah (fasilitas yang menonjol). Memiliki *leading industries* yang dapat mempengaruhi perkembangan wilayah disekitarnya.
8. Wilayah pusat pengembangan baru harus mampu mendorong perkembangan wilayah pedesaan atau terkait dengan kebijakan pengembangan wilayah pedesaan umumnya (seperti agropolitan)

Berdasarkan kriteria dan analisis komprehensif tersebut dihasilkan empat kluster pusat pertumbuhan baru terpilih di empat Kabupaten dan satu tambahan (pelengkap) kluster di Kota Yogyakarta. Penggunaan kluster dalam pemilihan pusat pertumbuhan dikarenakan kesulitan membatasi perkembangan dengan batas administrasi dan adanya keterkaitan fungsional yang erat dengan wilayah sekitarnya. Kluster terpilih sebagai pusat pertumbuhan baru adalah Kluster Sentolo (Kabupaten Kulonprogo), Kluster Srandakan-Galur (Kabupaten Bantul), Kluster Playen-Patuk (Kabupaten Gunung Kidul), Kluster Tempel-Sleman (Kabupaten Sleman), dan Kluster Giwangan (Kota Yogyakarta), dengan ciri-ciri sebagaimana di uraikan pada tabel 11 dan Lampiran Gambar 4).

Tabel 11. Kluster Pusat Pertumbuhan Baru Terpilih Propinsi DIY dan Karakteristiknya

KABUPATEN	KLUSTER DAN KARAKTERISTIKNYA
Kulon Progo	Kluser Sentolo
	<p>Kluster Sentolo memiliki hirarki wilayah tinggi dan ciri-ciri kekotaan yang kuat. Sentolo memiliki jarak yang cukup jauh dengan kota Yogyakarta, namun aksesibilitasnya sangat baik (karena berada di koridor Wates-Yogyakarta). Dalam tata ruang, diperuntukkan sebagai kawasan industri dan menampung luapan perkembangan kota Yogyakarta ke arah barat. Selain didukung oleh basis pertanian, di kluster ini juga telah berkembang kegiatan perdagangan yang cukup pesat dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kluster Sentolo diharapkan juga menjadi outlet bagi produk pertanian dan penggerak pembangunan perdesaan di belakangnya (<i>hinterland</i>), mengingat di belakangnya terdapat beberapa sentra produksi pertanian dan kawasan Agropolitan.</p>
Bantul	Kluster Srandakan-Brosot
	<p>Kekuatan kluster ini terutama karena letaknya di jalur selatan dan merupakan satu-satunya wilayah yang paling kuat karakter dan potensinya. Meskipun posisinya di lingkungan daerah perdesaan, namun kluster ini memiliki hirarki wilayah tinggi dan ciri-ciri kekotaan yang kuat. Srandakan-Galur berada di daerah pantai selatan Propinsi DIY, sehingga memiliki jarak yang jauh dengan kota Yogyakarta, namun aksesibilitasnya sangat baik. Selain itu Srandakan-Galur juga merupakan simpul transportasi daerah selatan dan pantai di Yogyakarta bagian Barat. Dalam tata ruang, dua daerah ini diperuntukkan untuk kawasan pertanian, pariwisata, permukiman, dan perdagangan. Kluster ini relatif mandiri dan jauh dari pengaruh perkembangan kota Yogyakarta dan sekitarnya. Adanya rencana pengembangan jalur selatan Jawa, khususnya mulai dari Cilacap-Pacitan memberikan peluang ke depan yang cukup potensial bagi kluster ini untuk menjadi pusat pertumbuhan baru, khususnya di jalur selatan. Selain didukung oleh basis pertanian (<i>agro district</i>), di kluster ini juga telah berkembang kegiatan perdagangan yang cukup pesat dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta pengembangan kawasan wisata pantai.</p>
Gunung Kidul	Kluster Patuk-Playen
	<p>Kluster Playen-Patuk memiliki jarak yang cukup jauh dengan kota Yogyakarta, namun dibanding wilayah lain di Kabupaten Gunung Kidul merupakan wilayah yang paling dekat. Oleh karena itu aksesibilitasnya sangat baik (karena berada di koridor Wonosari-Yogyakarta). Selain itu di Playen juga merupakan simpul transportasi dari arah selatan Kabupaten Gunung Kidul ke arah Yogyakarta ('pintu' utara) dan daerah wisata</p>

Lanjutan Tabel 11

	<p>menjadi bagian dari Aglomerasi perkotaan di kabupaten Wonosari, diperuntukkan untuk kawasan pertanian lahan kering, perdagangan dan permukiman. Selain itu juga terdapat kawasan khusus berupa lapangan terbang dan fasilitas militer. Selain didukung oleh basis pertanian, di kluster ini juga telah berkembang kegiatan perdagangan yang cukup pesat dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu kompleks bumi Antena Oro-oro, Gading, dan perluasan landasan pacu pesawat terbang (desa Gading) juga menjadi daya tarik tersendiri. Kluster Playen-Patuk diharapkan juga menjadi outlet bagi produk pertanian dan penggerak pembangunan perdesaan di belakangnya (<i>hinterland</i>), terutama bagi pengembangan wisata di bagian selatan dan Wana Gama, selain kemungkinan pengembangan beberapa sentra produksi pertanian.</p>
Sleman	Kluster Tempel-Sleman
	<p>Kluster Tempel-Sleman, meskipun posisinya di lingkungan daerah perdesaan, namun memiliki hirarki wilayah tinggi dan ciri-ciri kekotaan yang kuat. Tempel-Sleman berada di jalur arteri Magelang-Yogyakarta, sehingga aksesibilitasnya sangat baik dan memiliki jarak yang jauh dengan kota Yogyakarta. Selain itu Tempel juga merupakan simpul penghubung transportasi daerah timur Kabupaten Sleman, bahkan dari jalur Solo. Meskipun dua daerah ini (dalam tata ruang) diperuntukkan untuk kawasan resapan air, namun potensi budidaya seperti pertanian, permukiman, perdagangan, dan industri menjadi unsur penting. Posisi jalur transportasi Magelang-Yogyakarta memberikan peluang ke depan yang cukup potensial bagi kluster ini untuk menjadi pusat pertumbuhan baru, apalagi pada saat ini telah muncul beberapa industri. Kluster ini didukung potensi daerah <i>hinterland</i> berupa basis pertanian (<i>agro district</i>), sehingga diharapkan juga menjadi outlet bagi produk pertanian dan penggerak pembangunan perdesaan di belakangnya, khususnya bagi sentra produksi pertanian dan kawasan Agropolitan (khususnya di agropolitan salak pondoh di Tempel dan Pakem).</p>
Yogyakarta	Kluster Giwangan
	<p>Giwangan masih memiliki <i>open space</i> yang cukup luas untuk dikembangkan. Kluster Giwangan meskipun peringkatnya rendah, namun memiliki kecenderungan yang terus naik, demikian pula dengan ciri-ciri kekotaan yang semakin kuat. Pengembangan kluster Giwangan termasuk wilayah potensial pengembangan <i>ringroad</i> selatan, dimana Giwangan merupakan inti pengembangan, karena eksistensi Terminal Baru Giwangan. Giwangan merupakan simpul transportasi dari dan ke Yogyakarta dari segala arah. Dalam tata ruang Kota Yogyakarta, kluster Giwangan diperuntukkan untuk kawasan perdagangan, terminal, dan permukiman. Selain didukung oleh basis kegiatan perkotaan, di kluster ini juga telah berkembang kegiatan perdagangan yang cukup pesat dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu kompleks Terminal Giwangan yang dipadukan dengan bisnis perdagangan menjadi inti daya tarik kluster ini.</p>

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Analisis dinamika sistem kota-kota di Propinsi DIY sepanjang tahun 1960-2002 memperhatikan gejala *primacy* atau pemusatan perkembangan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya (pinggiran), namun sejak periode 1990-2002 telah terjadi sedikit penurunan nilai indeks, yang berarti memperlihatkan mulai tersebarnya perkembangan ke wilayah lain, di luar Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta.

Berdasarkan analisis sistem hirarki dan karakter kekotaan dihasilkan 3 tipe potensial sebagai pusat pengembangan baru, yang dinamakan pusat pengembangan utama, pusat pengembangan kedua, dan pusat pengembangan ke tiga. Semakin tinggi peringkat atau hirarki wilayah, semakin dinamis pula perubahan peringkatnya, baik naik maupun turun, serta semakin tinggi pula nilai atau karakter kekotaan yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah berperingkat tinggi umumnya juga berciri kekotaan yang tinggi pula. Fenomena pemusatan perkembangan yang terjadi di kota Yogyakarta dan sekitarnya merupakan bukti empiris.

Berdasarkan kajian aspek kebijakan tata ruang, studi literatur dan wawancara dihasilkan sejumlah kriteria yang komprehensif dalam penentuan pusat pertumbuhan baru di propinsi DIY, yang kemudian di pilih satu kluster pusat pertumbuhan di masing-masing Kabupaten, yaitu : Kluster Sentolo (Kabupaten Kulonprogo), Kluster Srandakan-Galur (Kabupaten Bantul), Kluster Playen-Patuk (Kabupaten Gunung Kidul), Kluster Tempel-Sleman (Kabupaten Sleman), dan Kluster Giwangan (Kota Yogyakarta).

Saran

Redistribusi hasil-hasil pembangunan yang lebih merata ke seluruh wilayah, terutama wilayah yang memiliki hirarki dan sifat kekotaan rendah, namun menunjukkan gejala perkembangan yang relatif cepat atau pusat pertumbuhan baru terpilih. Kluster pusat pertumbuhan baru diharapkan berfungsi sebagai katalisator dan penggerak perkembangan pada wilayah-wilayah tersebut, bahkan sampai pada wilayah tertinggal atau terbelakang. Perlunya pembentukan tata ruang perwilayahan dan pembentukan sistem kota-kota yang mempunyai hirarki yang sistematis dan fungsional, yaitu perlu perhatian dan tekanan yang lebih besar kepada kluster pusat pertumbuhan baru dan mengarahkan investasi pembangunan (pemerintah maupun swasta) ke wilayah tersebut. Selain itu pusat pertumbuhan baru harus 'mandiri' dan diintegrasikan dengan wilayah belakangnya (*hinterland dan agropolitan*).

Perlu kajian yang lebih detil berupa penyusunan master plan dan action plan di masing-masing kluster pusat pertumbuhan baru yang terpilih. Pemerintah daerah dapat menempuh jalur kerjasama maupun melakukan kajian mandiri untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru tersebut agar secara riil dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

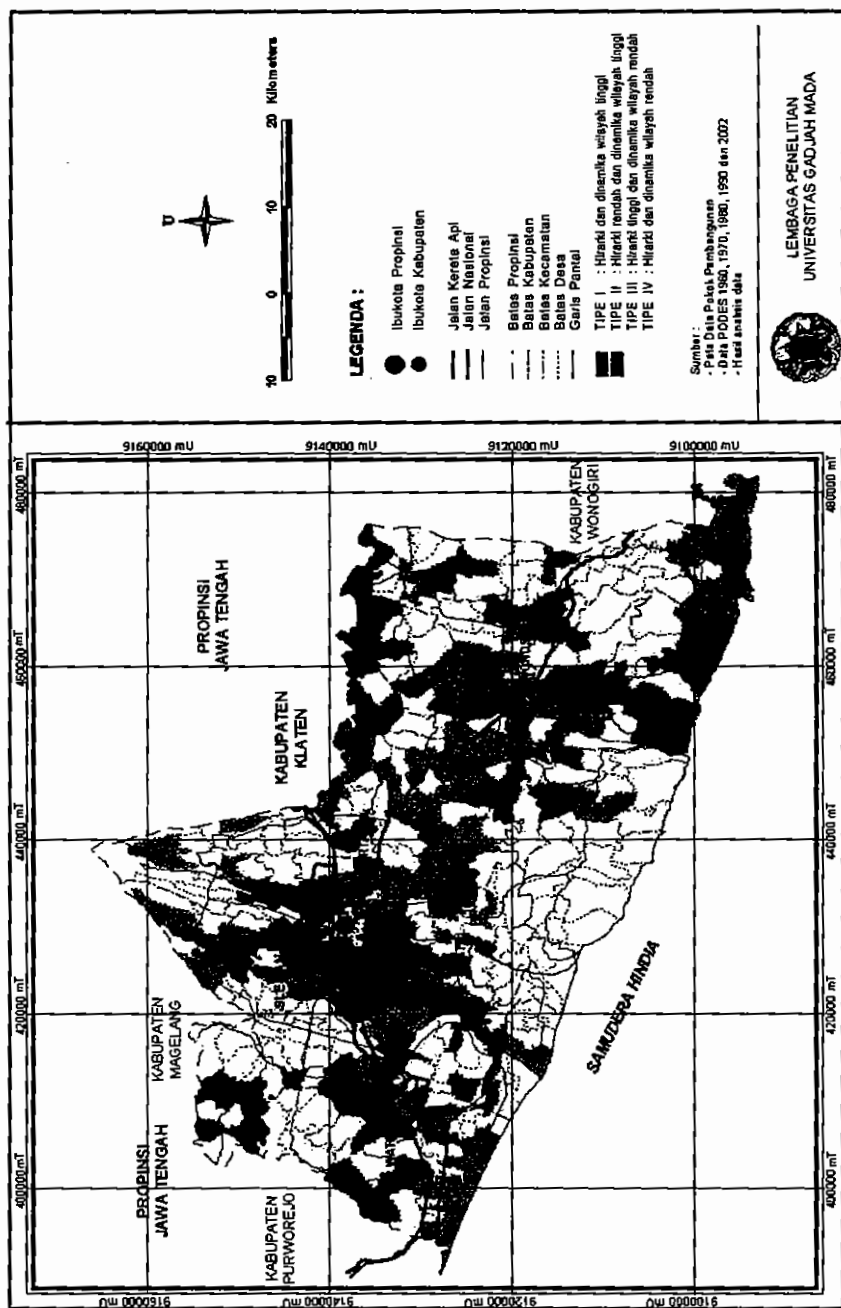
UCAPAN TERIMA KASIH

1. Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, atas dukungan dana penelitian dari Anggaran Dana DIK MAK 5250 UGM Tahun 2004
2. Fakultas Geografi UGM dan Jurusan Perencanaan Pengembangan Wilayah
3. Asisten Peneliti Lapangan dan Studio

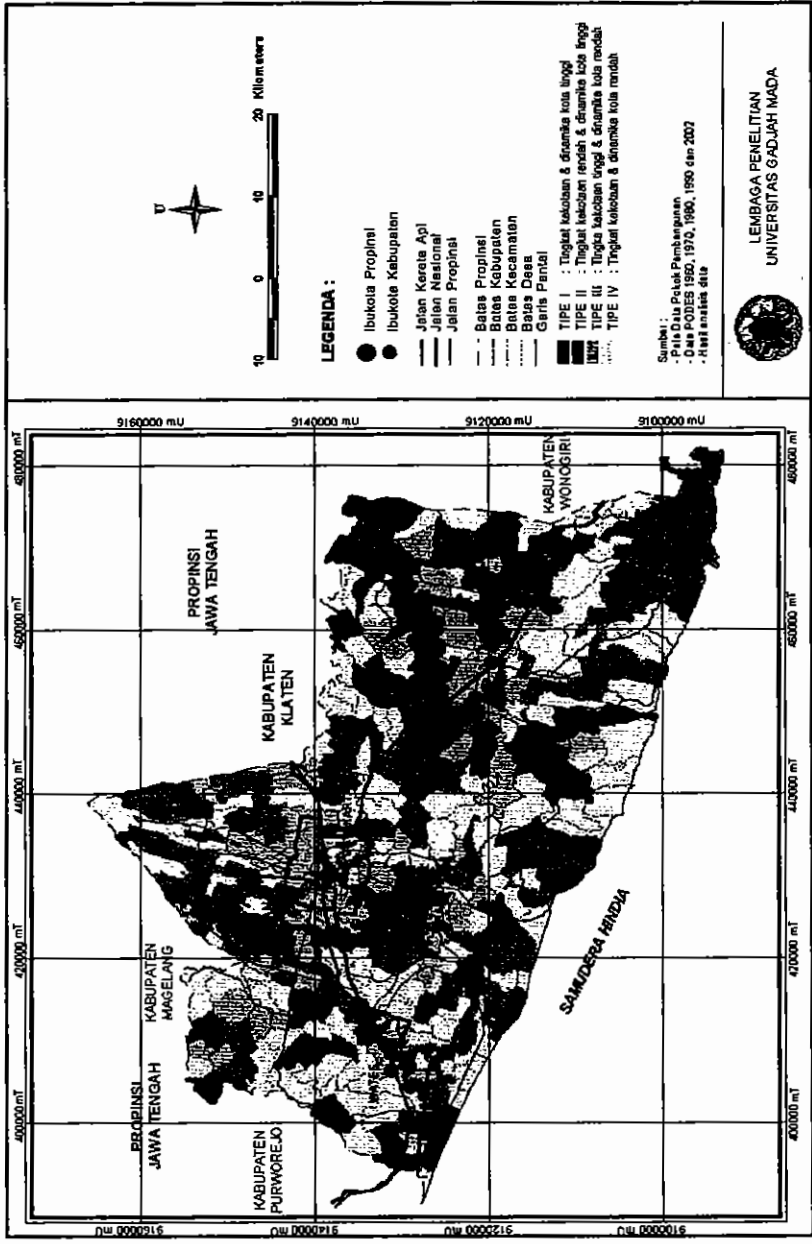
DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1983. *Guidelines for Rural Center Planning*, Economic and Social Commission for Asia and The Pasific. United Nation. New York.
- Budhy, Tjahjati. 2004. *Kebijakan Nasional Perkotaan dalam Memasuki Millenium Ketiga*. www.bktrn.go.id. Diakses tanggal 23 Maret 2004
- Dharmapatti. 1993. *Fenomena Mega Urban dan Tantangan Pengelolaannya*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Planologi ITB. Bandung.
- Dusseldorp, D. B. W. M. 1981. *Planning of Service Centers in Rural Areas of Developing Countries*. International Institute For Land Reclamation and Improvement. Wageningen. The Netherlands.
- ESCAP-UN (1993). *State of Urbanization in Asia and the Pasific 1993*. New York.
- Firman, Tommy. 1997. *Urbanisasi, Persebaran Penduduk dan Tata Ruang di Indonesia*. Jurnal PWK, Nomor 22/Mei 1996.
- Fisher, H. B. dan Shyamadas. 1983. *Hierarchical Location Analysis for Integrated Area Planning : Experience of the pilot Research Project in Growth Centers, India*. Paper presented in the 1983 Regional Science Congress in Vienna.
- Friedman, John, 1976. *Regional Development, A Case Studi of Venezuela*, MIT Press.
- Friedman, John dan Alonso, William. 1975. *Regional Policy, Reading in Theory and Application*. MIT Press.
- Haeruman, Herman. 2004. *Sistem Kota-kota Dalam Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Fungsi Kota*. www.bktrn. go.id. Diakses tanggal 23 Maret 2004
- Glasson, J. 1977. *Pengantar Perencanaan regional*. LPFE UI Jakarta.
- Kusbiantoro, B.S. 2004. *Manajemen Pembangunan Kota Masa Depan*. www.bktrn. go.id. Diakses tanggal 23 Maret 2004
- McGee, T.G and Ginsburg, N, 1991. *The Extended Metropolis : Settlement Transition in Asia*, The University of Hawaii Press.
- Misra, R.P. 1975. *Growth Poles and Growth Centers in the Context of India's Urban and Regional Development Problems*. In Anthony Kuklinski (Ed). *Growth Poles and Growth Centers In regional Planning*. Vol. 5. Mouton. Paris. The Hague.
- Moelyarto, Tjokrowinoto. 1995. *Pengembangan Kawasan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*. CIDES-P3PK UGM.
- Morril I. Richard 1974. *The Spatial Organization of Settlements*. Mouton. Paris.

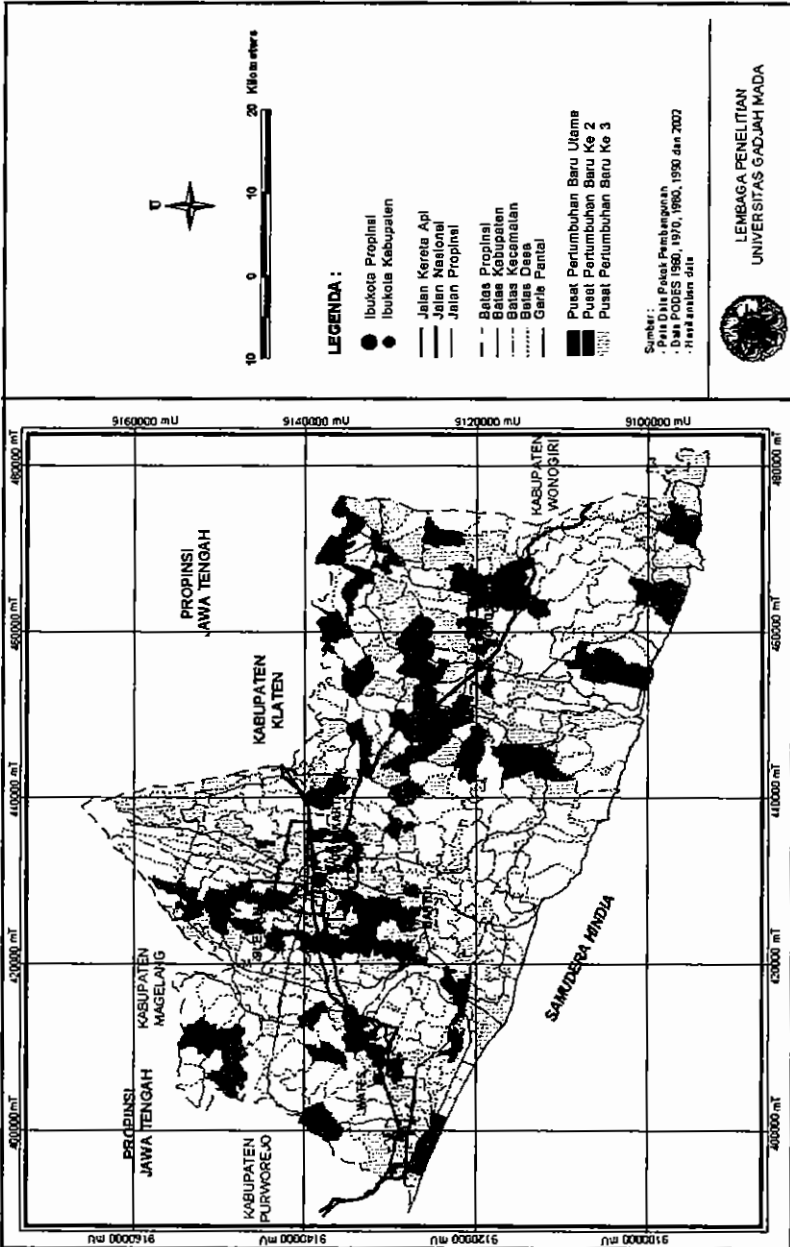
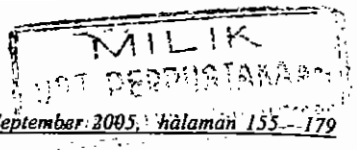
- JUDS-2000. *National Urban Development Strategy : A Policy Review and Improvement The IUIDP Cncept*. www.cbuim-indo.org. Diakses : 24 Maret 2004.
- Nurzaman, Siti Nutriah. 2000. *Hirarki Permukiman*. Departemen Planologi ITB. Bandung
- Rondinelli, Dennis A. 1985. *Applied Methods of Regional Analysis*, Westview Press. 1985.
- Rondinelli, Dennis A. and Kenneth Ruddle. 1978. *Urbanization and Rural Development : Spatial Policy for Equitable Growth.*, Preager Publisher. New York. 1978.
- Rondinelli, Dennis A. 1983. *Spatial Factors In Resources System : Spatial Analysis for Integrated Regional Development Planning in the Bicol River Basin of the Philipines*. UN University and Chung Ang University. Seoul Korea.
- Soetomo, Sugiono. 2004. *Urban Development as the Interface of Regional Development from Below in Central Java-Indonesia, The Case of Semarang Metropolitan*. Jakarta. IsoCarp Congress.
- Talkurputra, Nad Darda. 2004. *Penataan Ruang Perkotaan*. www.bktrn. go.id. Diakses tanggal 23 Maret 2004
- Taylor, D.R.F. 1981. *Roles and Function of Lower Order Centers in Rural Development*. In Fu Chen Lo (Ed). *Rural-Urban Relations and Regional Development*. Maruzen Asia. Nagoya, Japan.
- Tjiptoherijanto, Priyono. 1999. *Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia*. Populasi, 10(2), tahun 1999. Yogyakarta.
- United Nation. 1994. *Mega City, Growth and Future*.
- United Nations. 1995. *World Urbanization Prospects : The 1994 Revision*. New York.
- World Bank. 2004. *Kota-kota Dalam Transisi : Tinjauan Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia*. www.worldbank.org. Diakses : 24 Maret 2004.



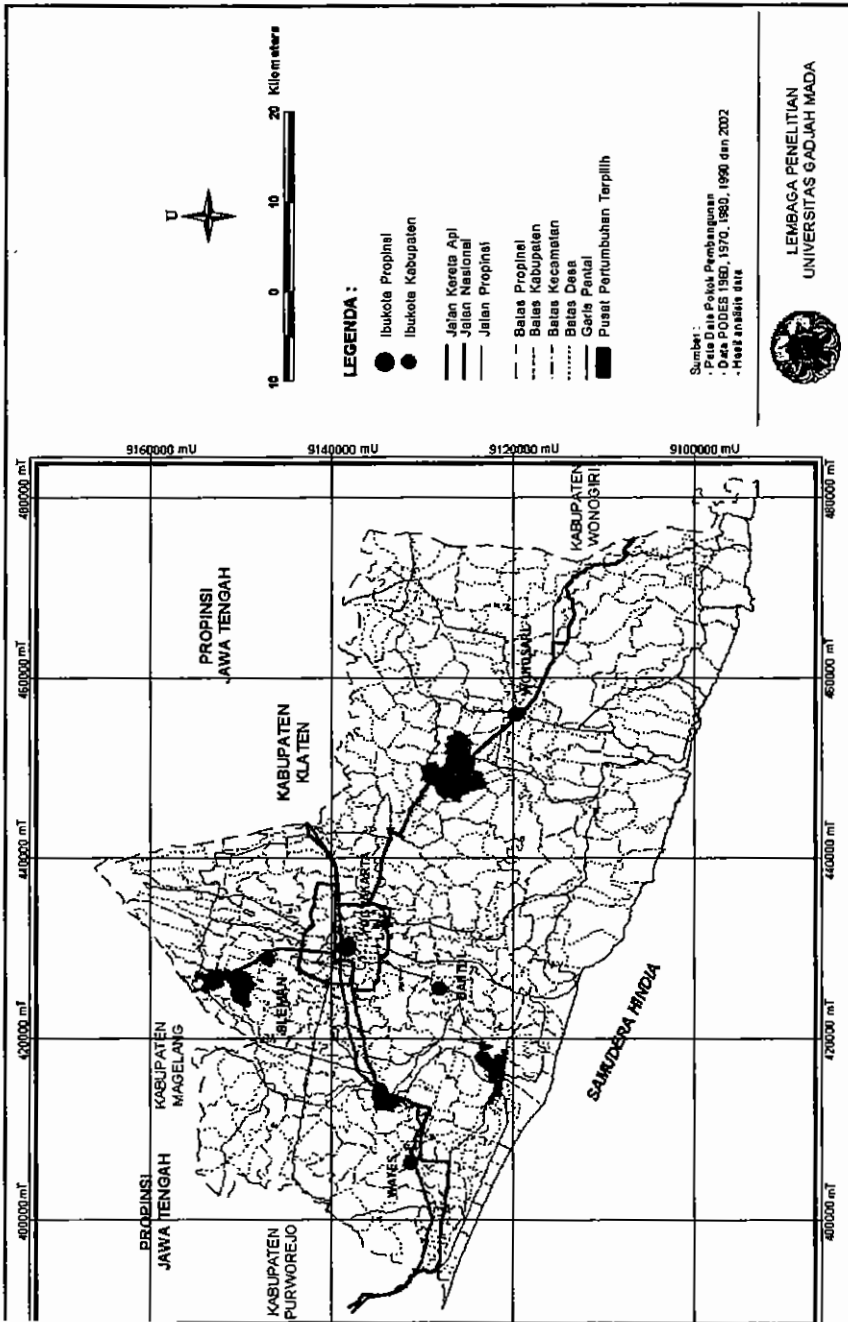
Gambar 1. Peta Tipe Hiriarki Wilayah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 2. Peta Tipe Kekotaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 3. Peta Tipe Potensi Pusat Pertumbuhan di Propinsi DIY



Gambar 4. Peta Pusat Pertumbuhan Baru Terpilih di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta